

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI MADRASAH IBTIDAIYAH**(Tantangan dan Strategi Penguatan)**

¹⁾Misbahul Huda, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban,
email : misbahulhuda@iainutuban.ac.id

²⁾Nurlaili Dina Hafni, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban,
email : nurlailidinahafni@iainutuban.ac.id

Abstract

Inclusive education represents a paradigm that emphasizes the right of every child to access equitable and quality learning regardless of physical, intellectual, social, emotional, or linguistic differences. Madrasah Ibtidaiyah (Islamic elementary schools) play a significant role in realizing inclusive education; however, the implementation remains inconsistent with national policy frameworks. This study aims to analyze key challenges and formulate evidence-based strategies to strengthen inclusive education practices within Madrasah Ibtidaiyah. The study employs a systematic-constructive literature review by analyzing academic publications, national and international policy reports, and case studies of inclusive madrasahs published between 2021 and 2025. Thematic analysis was conducted on five major aspects: policy implementation, teacher capacity, infrastructure, funding, and socio-cultural factors. The findings reveal that the main barriers to implementing inclusive education in Madrasah Ibtidaiyah include: (1) the gap between normative policy and operational practice; (2) limited teacher competence and lack of support personnel; (3) inadequate infrastructure and accessibility; (4) persistent social stigma toward children with special needs; and (5) insufficient funding and institutional incentives. Strengthening strategies include developing technical implementation guidelines, continuous professional development programs using micro-credential systems, establishing Inclusive Madrasah Teams, and integrating Islamic values as ethical and cultural foundations for inclusive practice. This study concludes that the success of inclusive education in Madrasah Ibtidaiyah depends on the harmonization of policy, teacher competency, community engagement, and Islamic spiritual values as the moral basis for educational equity. The findings contribute to policy formulation and practical models of inclusive Islamic education that are contextually relevant to Indonesia's socio-religious landscape.

Keywords: *inclusive education, Madrasah Ibtidaiyah, education policy, Islamic values*

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan paradigma yang menekankan hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai lembaga pendidikan dasar berciri keislaman turut menjadi bagian dari gerakan menuju inklusivitas. Namun, implementasi pendidikan inklusif di MI masih menunjukkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan merumuskan strategi penguatan implementasi pendidikan inklusif di MI. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis-konstruktif, dengan menelaah publikasi akademik, laporan kebijakan nasional dan internasional, serta studi kasus madrasah yang diterbitkan antara tahun 2021–2025. Analisis dilakukan secara tematik terhadap isu kebijakan, kapasitas guru, infrastruktur, pendanaan, dan aspek sosial-budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi pendidikan inklusif di MI mencakup: (1) kesenjangan antara kebijakan normatif dan operasional; (2) rendahnya kapasitas guru dan ketiadaan tenaga pendukung; (3) keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas; (4) stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus; serta (5) minimnya pendanaan dan insentif kelembagaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan berupa penyusunan *panduan teknis operasional*, pelatihan guru berkelanjutan dengan sistem *micro-credential*, pembentukan *Tim Inklusi Madrasah*, serta integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik inklusi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di MI bergantung pada harmonisasi antara kebijakan, kompetensi guru, dukungan masyarakat, dan nilai spiritual keislaman yang menjadi karakter khas madrasah. Temuan ini memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan berbasis bukti dan model praktik baik yang relevan bagi pendidikan dasar Islam di Indonesia.

Kata kunci: pendidikan inklusif, madrasah ibtidaiyah, kebijakan pendidikan, nilai keislaman

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan paradigma pendidikan yang menuntut agar seluruh anak, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan bermutu dalam satu lingkungan belajar bersama. Gerakan menuju inklusivitas di Indonesia telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan umum dan juga ke dalam madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, implementasinya di lapangan khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan praktik UNESCO¹. Hal tersebut berdasarkan data Yayasan Wahana Inklusif Indonesia menyatakan bahwa implementasi pendidikan inklusif di madrasah seringkali dilakukan tidak sesuai aturan inklusifitas dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik peserta didik disabilitas. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas dan sumber daya sekolah, kurangnya pemahaman guru, serta resistensi

¹ UNESCO, *Inclusion and Education*.

terhadap beban kerja yang meningkat akibat implementasi pendidikan inklusif². Data tersebut sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah meningkatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat kesenjangan dalam implementasi dan alokasi sumber daya antar sekolah³.

Sejumlah regulasi telah diterbitkan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang mengamanatkan setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk menyediakan pendidikan inklusif dari tingkat dasar hingga menengah bagi siswa dengan hambatan fisik, mental, sosial, dan kecerdasan istimewa⁴. Kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Meskipun kerangka regulasi telah terbangun, analisis menunjukkan bahwa sekolah inklusif di Indonesia, termasuk madrasah, seringkali belum memenuhi persyaratan standar, terutama dalam hal pengelolaan dan penyediaan sumber daya yang adekuat⁵.

Pendidikan inklusif menurut garry hornby⁶ mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendekatan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam lingkungan sekolah umum, dengan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan tantangan kunci dalam implementasi pendidikan inklusif di MI; (2) merumuskan strategi penguatan yang berbasis bukti dan praktik; (3) memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik untuk pengambil keputusan di tingkat madrasah dan dinas/instansi terkait.

Metodologi

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur sistematis-konstruktif: pengumpulan dan analisis studi primer (jurnal penelitian, studi kasus MI, laporan kebijakan nasional dan internasional 2021–2025), evaluasi tematik terhadap kendala dan strategi, serta sintesis rekomendasi kebijakan yang dapat dioperasionalkan di level MI. Kriteria inklusi literatur: terbit

² Hardiani, Hendriani, and Airlangga, “Optimalisasi Intervensi Pada Peran Guru Dalam Pendidikan Inklusi : Sebuah Systematic Literature Review Berbasis Index for Inclusion.”

³ Fajri and Jauhari, “Challenges and Opportunities for Special-Needs Children in Elementary Schools.”

⁴ Efendi et al., “Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools.”

⁵ Gunawan, “Does Indonesia ’ s Inclusive Curriculum Education Sustainability in Privat Madrasah Program ?”

⁶ Hornby, *Incl. Spec. Educ.*

antara 2021–2025, berfokus pada pendidikan inklusif pada tingkat dasar atau madrasah, dan berasal dari sumber akademik atau lembaga terkemuka. Untuk konteks nasional, dimasukkan pula studi kasus dan tesis yang memuat data lapangan MI ⁷.

Hasil

Tantangan Utama Implementasi Inklusi di Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan tinjauan literatur dan studi kasus di berbagai provinsi, tantangan utama yang konsisten muncul adalah:

1. Kesenjangan kebijakan dari pemerintah pusat ke sekolah madrasah madrasah

Kebijakan inklusi nasional dan pedoman madrasah seringkali bersifat normatif tanpa pedoman teknis yang jelas untuk operasionalisasi di MI. Banyak madrasah tidak memiliki rencana implementasi terperinci atau standar minimal layanan inklusi. Hal ini memperlemah keberlanjutan program inklusi ⁸.

2. Kapasitas guru dan tenaga pendukung yang terbatas

Banyak guru MI belum menerima pelatihan khusus untuk mengidentifikasi dan mendukung ABK. Ketiadaan guru pembelajaran khusus atau asisten terlatih menyebabkan praktik inklusi menjadi superficially “menggabungkan” siswa tanpa dukungan pedagogis yang memadai. Studi pengukuran kompetensi guru menunjukkan hubungan kuat antara kapabilitas guru dan kualitas inklusi ⁹.

3. Infrastruktur dan aksesibilitas fisik

Kondisi gedung, fasilitas kebersihan, toilet, akses kursi roda, dan bahan pembelajaran adaptif seringkali tidak memadai untuk siswa dengan kebutuhan fisik. Keterbatasan anggaran madrasah swasta maupun negeri membuat perbaikan sarana sulit dilakukan tanpa intervensi kebijakan atau bantuan dana khusus ¹⁰.

4. Sikap sosial dan stigma

Stigma terhadap ABK, miskonsepsi tentang kemampuan belajar mereka, dan kekhawatiran orang tua/perusahaan jahit? (sic) terhadap “dampak” inklusi pada nilai akademik kelas masih

⁷ Oswal et al., “A Systematic Review of Inclusive Education Strategies for Students of Determination in Higher Education Institutions: Current Challenges and Future Directions.”

⁸ Nugraha et al., “Analysis of The Implementation of Inclusive Education Policy in Indonesia : A Literature Review.”

⁹ Vantieghem et al., “Education for All in Action: Measuring Teachers’ Competences for Inclusive Education.”

¹⁰ Yulizah and Riyan Oktori, “Inclusive Education in Madrasah Ibtidaiyah: A Reflective Study of 21 St Century Dynamics, Challenges, and Opportunities.”



menjadi hambatan nonteknis. Perubahan sikap memerlukan program sosialisasi, pendidikan orang tua, dan bukti praktik yang berhasil¹¹.

5. Keterbatasan pendanaan dan insentif

Tanpa alokasi anggaran yang jelas untuk layanan inklusi (mis. gaji asisten, pelatihan guru, alat bantu belajar), madrasah kesulitan mempertahankan program inklusi dalam jangka panjang. Studi kebijakan mengusulkan model insentif dan ringkasan alokasi anggaran untuk mendukung madrasah inklusi¹².

Strategi Penguatan Implementasi Inklusi di MI

Berikut strategi yang diusulkan, dipadu dari bukti literatur nasional dan internasional, serta praktik di beberapa madrasah:

1. Penguatan kebijakan operasional dan panduan teknis

Kementerian Agama (bersama Dinas Pendidikan daerah) perlu menyusun Panduan Teknis Implementasi Inklusi di MI yang menerjemahkan kebijakan ke langkah operasional—mis. standar layanan minimal, format Rencana Inklusi Madrasah (RIM), dan indikator monitoring. Panduan harus mencakup alat asesmen kebutuhan awal siswa, checklist fasilitas, dan template rencana intervensi individual (Individualized Education Plan—IEP) yang disesuaikan konteks MI¹³.

2. Pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan

Program pelatihan guru (in-service) tentang pedagogi inklusif, diferensiasi instruksional, manajemen kelas heterogen, dan penggunaan alat bantu sederhana harus menjadi prioritas. Sertifikasi micro-credential untuk kompetensi inklusi dapat memberi insentif profesional. Mentoring dan coaching lapangan dari guru spesial/pendamping inklusi (special educators) mempercepat transfer keterampilan praktik. Studi menunjukkan pelatihan berkelanjutan meningkatkan self-efficacy guru dan praktik inklusi¹⁴.

3. Model manajemen kolaboratif di madrasah

Bentuk tim inklusi madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, guru kelas, guru BK (bimbingan konseling), perwakilan orang tua, dan, bila perlu, perwakilan layanan kesehatan

¹¹ Judijanto and Al-Amin, “CHALLENGES AND STRATEGIES IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION: A METAANALYSIS OF GLOBAL PERSPECTIVES.”

¹² Korotkov and Yarrow, “Options to Improve Indonesia’s Inclusive Education Curriculum Rights and Permissions Options to Improve Indonesia’s Inclusive Education Curriculum.”

¹³ Nugraha et al., “Analysis of The Implementation of Inclusive Education Policy in Indonesia : A Literature Review.”

¹⁴ Vantieghem et al., “Education for All in Action: Measuring Teachers’ Competences for Inclusive Education.”



lokal. Tim ini bertugas merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi inklusi dengan periodic review.

Mekanisme rujukan ke layanan eksternal (terapi wicara, terapi okupasi, psikolog) harus jelas, termasuk peta layanan lokal dan prosedur rujukan¹⁵.

4. Adaptasi kurikulum dan asesmen formatif

Terapkan diferensiasi tujuan pembelajaran dan asesmen formatif yang menilai kemajuan individual berdasarkan IEP. Materi ajar dan bahan bacaan yang dapat diakses (besar font, audio, manipulatif) perlu disediakan.

Pendekatan “Universal Design for Learning” (UDL) dapat menjadi kerangka untuk mendesain pembelajaran yang lebih inklusif. Literatur internasional menunjukkan UDL efektif dalam meningkatkan partisipasi¹⁶.

5. Dukungan asisten dan program berbasis guru pendukung (special assistant)

Rekrutmen asisten pembelajaran (special assistants) di MI yang menerima kompensasi/insentif, setidaknya pada madrasah dengan beberapa ABK. Asisten ini berperan pada diferensiasi tugas, pendampingan individual, dan komunikasi dengan orang tua. Studi nasional menyoroti peran krusial asisten dalam manajemen inklusi harian¹⁷.

6. Pendanaan terarah dan model insentif

Skema pendanaan berbasis kinerja inklusi (mis. dana tambahan untuk madrasah yang memenuhi indikator inklusi) dapat memacu keberlanjutan. Alternatif lain: kerjasama dengan NGO, CSR perusahaan, dan komunitas untuk menutupi biaya fasilitas dan pelatihan. Laporan World Bank/UNESCO menyoroti perlunya pembiayaan terarah¹⁸.

7. Kampanye perubahan sikap dan sosialisasi komunitas

Program literasi inklusi untuk orang tua, siswa lain, dan masyarakat setempat (ceramah, workshop, kegiatan bersama) untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan.

¹⁵ Achmad and Samaeng, “Inclusive Education Management for Children with Special Needs in Madrasah Ibtidaiyah.”

¹⁶ Woodcock et al., “Teacher Self-Efficacy and Inclusive Education Practices: Rethinking Teachers’ Engagement with Inclusive Practices.”

¹⁷ Muthohir Zuhad Mahya, Fardan Rabbani, and Saputra, “The Role of Special Assistant Teachers in Facilitating Inclusive Learning in Inclusive Schools.”

¹⁸ Korotkov and Yarrow, “Options to Improve Indonesia’s Inclusive Education Curriculum Rights and Permissions Options to Improve Indonesia’s Inclusive Education Curriculum.”

Praktik baik menunjukkan bahwa kegiatan bersama yang melibatkan prestasi anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengubah persepsi publik¹⁹.

8. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik inklusi (kontekstualisasi MI)

Di lingkungan MI, internalisasi nilai-nilai Islam (mis. prinsip keadilan, kasih sayang, persaudaraan) dapat memperkuat landasan moral untuk inklusi. Beberapa studi kasus madrasah menunjukkan integrasi nilai religius memperkuat komitmen stakeholder lokal²⁰.

Pembahasan

Banyak regulasi pendidikan inklusif di Indonesia masih bersifat normatif dan abstrak, tanpa penerjemahan ke dalam pedoman teknis yang konkret bagi lembaga pendidikan dasar, khususnya Madrasah Ibtidaiyah (MI). Akibatnya, kepala madrasah dan komite tidak memiliki instrumen operasional untuk menyusun anggaran, memprogram pelatihan, atau menetapkan KPI inklusi. Selain itu, kajian internasional menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar penempatan fisik melainkan transformasi sistemik yang mencakup kurikulum, asesmen, sumber daya manusia, dan budaya sekolah. Penekanan pada pendekatan kontekstual pada konteks MI yaitu mengintegrasikan aspek religius dan komunitas local merupakan kunci untuk penerimaan sosial dan keberlanjutan program. Implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks.

Pertama, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Regulasi seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan UU No. 20 Tahun 2003 telah menegaskan hak semua anak untuk memperoleh pendidikan bermutu, namun banyak dokumen kebijakan bersifat normatif tanpa panduan teknis yang konkret untuk operasionalisasi di tingkat MI²¹. Akibatnya, kepala madrasah dan guru tidak memiliki pedoman untuk merancang Rencana Inklusi Madrasah (RIM) atau rencana pembelajaran individual (IEP), sehingga implementasi berjalan sekadar administratif tanpa arah pengembangan yang sistematis²².

Kedua, kapasitas guru dan tenaga pendukung masih terbatas. Banyak guru MI belum mendapatkan pelatihan pedagogi inklusif secara komprehensif, terutama dalam hal diferensiasi

¹⁹ Judijanto and Al-Amin, "CHALLENGES AND STRATEGIES IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION: A METAANALYSIS OF GLOBAL PERSPECTIVES."

²⁰ Achmad and Samaeng, "Inclusive Education Management for Children with Special Needs in Madrasah Ibtidaiyah."

²¹ UNESCO, *Inclusion and Education*.

²² Hornby, *Incl. Spec. Educ.*



instruksional dan manajemen kelas heterogen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan dengan model mentoring dan coaching efektif meningkatkan self-efficacy dan keterampilan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus²³.

Ketiga, infrastruktur dan aksesibilitas fisik di madrasah masih jauh dari memadai. Sebagian besar MI, khususnya yang berstatus swasta, belum mampu menyediakan fasilitas dasar seperti ramp, toilet aksesibel, atau ruang belajar fleksibel. Solusi pragmatis seperti accessibility audit sederhana, kerja sama CSR, dan prioritas perbaikan bertahap dapat menjadi langkah awal yang realistis²⁴. Selain faktor teknis, stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi penghambat signifikan. Persepsi negatif dari masyarakat dan orang tua siswa reguler sering muncul karena minimnya pemahaman tentang potensi ABK. Pendekatan berbasis nilai keislaman seperti prinsip rahmah (kasih sayang) dan 'adl (keadilan) dapat digunakan sebagai landasan moral untuk mengubah persepsi dan membangun penerimaan sosial di lingkungan madrasah.

Keterbatasan pendanaan juga memperlemah keberlanjutan program inklusi. Tanpa alokasi dana khusus untuk pelatihan, penyediaan alat bantu, dan rekrutmen asisten pembelajaran, madrasah sulit mempertahankan program jangka panjang. Model pembiayaan berbasis kinerja inklusi serta kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta disarankan untuk memperluas sumber daya²⁵. Di tingkat kelembagaan, manajemen kolaboratif di madrasah inklusi perlu diperkuat melalui pembentukan Tim Inklusi Madrasah yang melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan²⁶.

Integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik inklusi menjadi kekuatan khas madrasah. Nilai-nilai spiritual seperti tanggung jawab sosial, kepedulian, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat memperkuat komitmen guru serta meningkatkan dukungan komunitas madrasah terhadap pendidikan inklusif²⁷. Dengan mengontekstualisasikan prinsip inklusi ke dalam budaya Islam lokal, madrasah dapat menjadi pionir pendidikan berkeadilan yang berakar pada nilai dan tradisi bangsa.

²³ Forlin and Sin, "In-Service Teacher Training for Inclusion: Best Practice Models for Professional Learning."

²⁴ UNICEF, "IN PURSUIT OF EDUCATION FOR ALL: Analysis of Education for Children with Disabilities in Selected Countries in Asia and the Pacific."

²⁵ OECD, "Education for Inclusive Societies Engaging Learners : Fostering Inclusion through Well-Being and Mental Health Supports Proceedings of the 11th Policy Forum."

²⁶ Hornby, *Incl. Spec. Educ.*

²⁷ Nugraha et al., "Analysis of The Implementation of Inclusive Education Policy in Indonesia : A Literature Review."

Kesimpulan

Implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia menghadapi tantangan multi-dimensi: kebijakan-operasional, kapasitas guru, infrastruktur, stigma sosial, dan keterbatasan pendanaan. Namun, bukti dari kajian literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa strategi penguatan yang terintegrasi meliputi panduan teknis, peningkatan kapasitas guru, manajemen kolaboratif, adaptasi kurikulum, dukungan asisten, pendanaan terarah, kampanye sosialisasi, dan integrasi nilai-nilai keislaman dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas inklusi di MI. Untuk membawa rekomendasi ini ke praktik, perlu pilotisasi di beberapa MI representatif, disertai monitoring & evaluasi yang ketat²⁸.

Pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada dasarnya telah memperoleh legitimasi kuat secara kebijakan melalui regulasi nasional, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan panduan operasional, rendahnya kapasitas guru dan tenaga pendukung, kurangnya aksesibilitas fisik, keterbatasan pendanaan, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan praktik inklusi di madrasah cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pedagogis yang mendukung kebutuhan individual peserta didik. Strategi kunci yang direkomendasikan meliputi: (1) penyusunan Panduan Teknis Implementasi Inklusi oleh Kementerian Agama yang berisi standar layanan minimal dan instrumen monitoring; (2) pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis praktik, mentorship, dan micro-credential; (3) peningkatan aksesibilitas fisik dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif; (4) pembentukan Tim Inklusi Madrasah untuk memperkuat manajemen kolaboratif; serta (5) pengintegrasian nilai-nilai keislaman sebagai landasan etis untuk memperluas penerimaan sosial terhadap pendidikan inklusif.

Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan, kapasitas guru, dukungan komunitas, dan nilai-nilai religius, madrasah dapat menjadi model pendidikan inklusif yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan konteks sosio-kultural Indonesia. Reformasi inklusif yang berbasis bukti dan nilai lokal diharapkan mampu mengantarkan madrasah menuju sistem pendidikan yang benar-benar ramah bagi semua anak tanpa kecuali.

²⁸ Achmad and Samaeng, "Inclusive Education Management for Children with Special Needs in Madrasah Ibtidaiyah."

Daftar Referensi

- Achmad, Syaefudin, and Wan Alawee Samaeng. "Inclusive Education Management for Children with Special Needs in Madrasah Ibtidaiyah." *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2025): 29–55. <https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v17i1.3413>.
- Efendi, Mohammad, Rizqi Fajar Pradipta, Dimas Arif Dewantoro, and Umi Safiul Ummah. "Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools," no. April (2022). <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15253a>.
- Fajri, Bayu Ramadhani, and Muhammad Nurrohman Jauhari. "Challenges and Opportunities for Special-Needs Children in Elementary Schools" 5, no. 70 (2024): 1–8.
- Forlin, Chris, and Kenneth Sin. "In-Service Teacher Training for Inclusion: Best Practice Models for Professional Learning,," <http://education.oxfordre.com/view/10.1093/acrefor>, 2017. <https://doi.org/10.1093/acrefor/9780190264093.013.161>.
- Gunawan, Agus. "Does Indonesia 's Inclusive Curriculum Education Sustainability in Privat Madrasah Program ?" 12, no. 2 (2023): 489–503. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v12-i2/16814>.
- Hardiani, Alifa Fauziah, Wiwin Hendriani, and Universitas Airlangga. "Optimalisasi Intervensi Pada Peran Guru Dalam Pendidikan Inklusi : Sebuah Systematic Literature Review Berbasis Index for Inclusion" 5, no. 3 (2025).
- Hornby, Garry. *Inclusive Special Education*. *Inclusive Special Education*, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1483-8>.
- Judijanto, Loso, and Al-Amin. "CHALLENGES AND STRATEGIES IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION: A METAANALYSIS OF GLOBAL PERSPECTIVES" 4, no. February (2024): 4–6.
- Korotkov, Kim, and Noah Yarrow. "Options to Improve Indonesia's Inclusive Education Curriculum Rights and Permissions Options to Improve Indonesia's Inclusive Education Curriculum," 2022. www.worldbank.org.
- Muthohir Zuhad Mahya, Yogi, Khafidh Fardan Rabbani, and Dwi Saputra. "The Role of Special Assistant Teachers in Facilitating Inclusive Learning in Inclusive Schools." *Jurnal Pendidikan Inklusi* 6, no. 2 (2022): 87–99.
- Nugraha, Redyadian Adhitya, Ravik Karsidi, Abdul Rahman, Sunardi Sunardi, Asrowi Asrowi, Tri Murwaningsih, and Mahardika Supratiwi. "Analysis of The Implementation of Inclusive Education Policy in Indonesia: A Literature Review." *Proceeding of International Conference on Special Education in South East Asia Region* 3, no. 1 (2024): 421–32. <https://doi.org/10.57142/picsar.v3i1.549>.
- OECD. "Education for Inclusive Societies Engaging Learners : Fostering Inclusion through Well-Being and Mental Health Supports Proceedings of the 11th Policy Forum," no. March (2024).
- Oswal, Nidhi, Mohammad Hani Al-Kilani, Rouhi Faisal, and Mohammad Fteiha. "A Systematic Review of Inclusive Education Strategies for Students of Determination in Higher Education Institutions: Current Challenges and Future Directions." *Education Sciences* 15, no. 5 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.3390/educsci15050518>.
- UNESCO. *Inclusion and Education*, 2020.
- UNICEF. "IN PURSUIT OF EDUCATION FOR ALL: Analysis of Education for Children with Disabilities in Selected Countries in Asia and the Pacific," 2023.
- Vantieghem, Wendelien, Iris Roose, Karin Goosen, Wouter Schelfhout, and Piet Van Avermaet.



“Education for All in Action: Measuring Teachers’ Competences for Inclusive Education.” *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291033>.

Woodcock, Stuart, Umesh Sharma, Pearl Subban, and Elizabeth Hitches. “Teacher Self-Efficacy and Inclusive Education Practices: Rethinking Teachers’ Engagement with Inclusive Practices.” *Teaching and Teacher Education* 117 (2022): 103802. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802>.

Yulizah, Yosi, and Agus Riyan Oktor. “Inclusive Education in Madrasah Ibtidaiyah: A Reflective Study of 21 St Century Dynamics, Challenges, and Opportunities.” *Journal of Basic Education* 9, no. 1 (2025): 2580–362. <https://doi.org/10.29240/jpd.v9i1.12085>.